

PEMANFAATAN DANA DESA PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH

(Studi Dokumentasi di Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB)

TESIS



Disusun Oleh:

DODI FEBRIAN
17208010017
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

Biodata Mahasiswa

NIM : 17208010017
Nama : DODI FEBRIAN, S.E
Tempat dan Tanggal Lahir : Kopong, 17 Februari 1993
Alamat : kopong, desa paok lombok kec.suralaga, LOTIM, NTB
RT.02 RW.01, paok lombok, Suralaga, KAB. LOMBOK
TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT
No Handphone : 081901688917
Email : DODIFEBRIAN7@GMAIL.COM
Nilai ICT :
Nilai Toec : 450 (18 November 2019)
Nilai Ikla : 303 (28 Agustus 2019)
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2019
Ketua Sidang : Dr. Abdul Haris, M. Ag.
Sekretaris : Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
Pembimbing : Dr. Abdul Haris, M. Ag.
Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.
Tugas Akhir dengan judul PEMANFAATAN DANA DESA PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH

Sekretaris

Yogyakarta, 11 Desember 2019

Ketua Sidang

Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
19710929 200003 1 001

Dr. Abdul Haris, M. Ag.
19710423 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-988/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMANFAATAN DANA DESA PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DODI FEBRIAN, S.E
Nomor Induk Mahasiswa : 17208010017
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Abdul Haris, M. Ag.
NIP. 19710423 199903 1 001

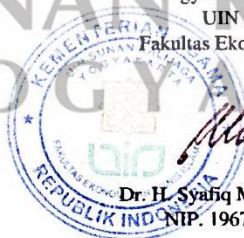
Penguji I

Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
NIP. 19710929 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.
NIP. 19761231 200003 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 11 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Dodi Febrian

Kepada :

**Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengarahkan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Lengkap : Dodi Febrian S.E

NIM : 17208010017

Judul : Pemanfaatan Dana Desa Perspektif

**Maqoshid Syari'ah (Studi Lapangan Di Kec. Suralaga, Kab.
Lombok Timur, NTB)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Megister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister dalam ilmu ekonomi syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Yogyakarta, 20/11/2019

Pembimbing,



Dr. Abdul Haris M. Ag.

NIP: 19710423 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dodi Febrian S.E
NIM : 17208010017
Tempat/Tanggal Lahir : Kopong, 17/02/1993
Fakultas/Universitas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Tahun Akademik : 2018/2019

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid Syari’ah (Studi Lapangan Di Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB)” merupakan karya saya sendiri, serta tidak melakukan plagiasi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik atau ada klaim terhadap keaslian tesis ini.

Yogyakarta, 20/11/2019

Yang menyatakan,



Dodi Febrian S.E

NIM: 17208010017

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Febrian S.E

NIM : 17208010017

No.Telepon : 0819-0168-8917

Dengan ini saya menyatakan bahwa bersedia untuk mempublikasikan tesis dengan judul:
Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid Syari'ah (Studi Lapangan Di Kec. Suralaga, Kab.
Lombok Timur, NTB).

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan harapan
penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Yogyakarta, 20/11/2019

Yang membuat pernyataan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Dodi Febrian S.E)

NIM: 17208010017



Motto

**SEBAIK-BAIK MANUSIA
IALAH
YANG BERMANFAAT BAGI SEKITARNYA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada peneliti sehingga dalam penyusunan tesis ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini. Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan “alhamdulillah” karena peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah, dengan judul tesis adalah **“Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid Syari’ah (Studi Lapangan Di Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB)”**.

Dalam penelitian tesis ini peneliti banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua peneliti. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda H. Mugni, Ibunda Bq. Emilia dan Segenap Keluarga Besar**, atas curahan kasih sayang, dorongan motivasi, dukungan do’a dan sokongan dana yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan sampai ditingkat perguruan tinggi.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, Bapak **Prof. Drs K.H. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.**
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, Bapak **Dr. H. Safiq Mahmadah Hanafi M.Ag** sekaligus dosen pembimbing akademik peneliti.
3. Bapak **Dr. Abdul Haris M.Ag** selaku pembimbing I, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab meskipun beliau sibuk, akan tetapi beliau tetap meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan aturan penelitian karya ilmiah.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik peneliti selama berada di perguruan tinggi sehingga peneliti memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta yang telah melayani peneliti dengan baik dalam menyelesaikan administrasi.

6. Kepada **Kepala Desa, Perangkat Desa, Kadus-kadus, Masyarakat Desa Paok Lombok, Tumbuh Mulia dan Bintang Rinjani** yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
7. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, Khususnya kelas A Angkatan 2017.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih banyak kekurangan, dengan kerendahan hati, peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan peneliti, Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya peneliti di masa yang akan datang. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kegiatan pendidikan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2019

Peneliti

Dodi Febrian

NIM. 17208010017

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Batasan Penelitian.....	10
1.6. Sitematika Pembahasan	11
KESIMPULAN.....	12
5.1. Kesimpulan.....	12
5.2. Implikasi	13
5.3. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tesis dengan judul: “Pemanfaatan Dana Desa Perspektif *Maqoshid Syari’ah* (Studi Lapangan Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)” dilatar belakangi oleh pemanfaatan Dana Desa di Suralaga sebagian besar digunakan dalam pembangunan yang sifatnya fisik (material), dan sebagian kecil saja yang menyentuh pembangunan yang sifatnya non-fisik (immateril) sesuai dengan kondisi sosial, agama, budaya dan ekonomi masyarakatnya. Suralaga merupakan wilayah kecamatan yang tersusun dari 15 desa definitif, dengan kondisi masyarakat mayoritas beragama Islam, dan potensi sumber daya melimpah. Dengan kondisi dan potensi masyarakat seperti ini sebaiknya pemanfaatan Dana Desa dengan pendekatan syari’at Islam.

Islam memberikan konsep yang mengatur semua urusan lahiriyah dan batiniah umatnya yang disebut dengan konsep *maqoshid syari’ah*. Penerapan konsep *maqoshid syari’ah* tidak hanya sebatas prinsip dalam menetapkan hukum syari’at dan ibadah saja. Akan tetapi, para cendekiawan islam saat ini sudah banyak mengembangkan konsep *maqoshid syari’ah* dalam berbagai bidang keilmuan di antaranya bidang muamalah seperti: politik, ekonomi dan juga keuangan. Salah satu penggunaan konsep *maqoshid syari’ah* dalam bidang keuangan adalah sebagai prinsip dalam mengelola keuangan desa atau Dana Desa.

Dana Desa dan *maqoshid syari’ah* memiliki tujuan yang sama yakni memberikan kesejahteraan (*kemaslahatan*) seluas-luasnya bagi masyarakat. Dana Desa adalah bentuk materil untuk membangun *kemaslahatan* masyarakat, sedangkan *maqoshid syari’ah* adalah prinsip dalam membangun *kemaslahatan* tersebut. Berdasarkan kondisi masyarakat Suralaga dan kajian konsep *maqoshid syari’ah* di atas, membuat peneliti ingin mengkaji implementasi anggaran Dana Desa diukur dari *maqoshid ad-dharuriyah* di tiga desa yang ada di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Suralaga tahun 2016-2018? 2) Apa yang menjadi prioritas penggunaan desa dikaji dari perspektif *maqoshid syari’ah*? 3) Apakah pemanfaatan Dana Desa di Suralaga sudah sesuai dengan konsep *maqoshid syari’ah*?

Penelitian ini menggunakan model studi dokumentasi (*document research*) dengan pendekatan kualitatif melalui tiga teknik pengumpulan data (informasi) yaitu dokumentasi, dan literasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemanfaatan dana desa di Suralaga mengedepankan pembangunan fisik (material), bahkan pada pembangunan non- fisik cenderung terabaikan. 2) Pemanfaatan Dana Desa memprioritaskan pada pembangunan ekonomi/harta (*hifzul maal*), hanya sebagian kecil dari anggaran desa yang dialokasikan untuk pembangunan keagamaan (*hifzun din*), pembangunan pendidikan (*hifzul aql*), pembangunan kesehatan (*hifzun nafs*), dan pembangunan generasi (*hifzun nasl*). 3) Secara umum pemanfaatan Dana Desa di Suralaga sudah mencerminkan prinsip *maqoshid syari’ah*, walaupun distribusi anggaran Dana Desa tersebut masih belum merata kelima indikator *maqoshid syari’ah*.

Kata Kunci: Dana Desa, Kemaslahatan, *Maqoshid Syari’ah*, Dcument Research

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara republik yang terbentuk hierarki wilayah mulai dari wilayah provinsi, kabupaten (kota), kecamatan (kelurahan), sampai ketingkat desa (dusun). Desa merupakan bagian terbawah dari hierarki pemerintahan Indonesia yang sangat dekat dan paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Desa merupakan wujud bangsa yang paling konkrit, sebab tiap-tiap desa memiliki budaya, suku, bahasa, agama, serta karakter penduduk yang berbeda-beda (Wijaya, 2010). Desa merupakan institusi otonom yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “desa menjadi satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola anggaran Dana Desanya masing-masing berdasarkan hak asal usul, adat istiadat yang berlaku dan diakui oleh sistem pemerintahan nasional maupun pemerintahan daerah”.

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, bukti konkrit keseriusan pemerintah dalam memajukan desa adalah diberlakukannya otonomi desa, sekaligus diberikannya anggaran Dana Desa yang begitu besar ke seluruh desa di Indonesia tiap tahunnya. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus

semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik, pembangunan fasilitas publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing desa (Rosalinda, 2014). Sejak diterapkannya otonomi desa maka peranan desa begitu vital, sebab pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab penuh kesemua desa dalam mengelola keuangan, merancang pembangunan dan membuat peraturan, demi mewujudkan kemaslahatan desanya masing-masing (Riyanto, 2015).

Data kementerian keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 anggaran keuangan desa sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.680 juta. Pada tahun 2016 anggaran ini meningkat menjadi Rp.47,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp.826 juta, dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.81,1 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh dana sebesar Rp.1 miliar, sedangkan untuk tahun 2018 meningkat menjadi 103,7 triliun dengan rata-rata desa mendapatkan Rp.1,4 miliar (Buku Saku Kemenkeu RI, 2017). Berdasarkan data kementerian keuangan tahun 2015 sampai 2017, khususnya berkaitan dengan Dana Desa di Kecamatan Suralaga yang bersumber dari APBN, dapat dilihat sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2017 di Kecamatan Suralaga.

No	Nama Desa	Dana Desa 2015	Dana Desa 2016	Dana Desa 2017	Dana Desa 2018
1	Dasan Borok	532.094.000	708.475.000	1.082.758.000	1.328.322.000
2	Gapuk	443.557.000	720.788.000	1.007.846.000	1.278.076.000
3	Paok Lombok	721.322.000	812.804.000	1.278.587.000	1.592.852.000
4	Bagek payung selatan	631.926.000	918.943.000	1.328.436.000	1.657.361.000

5	Suralaga	728.241.000	930.167.000	1.340.297.000	1.734.903.000
6	Anjani	631.926.000	805.727.000	1.278.920.000	1.682.970.000
7	Bintang Rinjani	427.225.000	798.605.000	1.076.250.000	1.269.503.000
8	Waringin	514.873.000	790.352.000	1.170.630.000	1.306.739.000
9	Bagek payung timur	602.431.000	781.462.000	1.374.280.000	1.742.870.000
10	Dames	429.907.000	766.301.000	1.060.482.000	1.268.420.000
11	Gerung permai	412.917.000	692.795.000	1.076.006.000	1.276.343.000
12	Kerongkong	636.285.000	808.874.000	1.278.287.000	1.579.084.000
13	Tumbu mulia	531.260.000	702.919.000	1.175.924.000	1.324.737.000
14	Tebaban	632.720.000	810.268.000	1.479.530.000	1.753.150.000
15	Bagek payung induk	729.972.000	901.138.000	1.673.556.000	1.856.063.000

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id¹

Dana yang begitu besar ini diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan, agar pemerintah desa di Kecamatan Suralaga khususnya dapat mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya bersama-sama dengan masyarakatnya, seperti potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, home industri, pariwisata lokal, dan potensi lainnya. Maka dari itu pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut dan memastikan pengelolaannya apakah sudah tepat guna dan tepat sasaran. Imam Abu Ubaid (w.150-224) dalam penelitian Zainil Ghulam (2016) menyatakan bahwa setiap perbuatan akan dihadapkan pada tanggung jawab. Dalam hal ini pemerintah desa di Kecamatan Suralaga sebagai penanggung jawab harus bertanggung jawab dalam mengatur kekayaan desa, menjalankan pemerintahan desa, menjaga keamanan desa, membangun fasilitas desa, dan mengembangkan sumber daya milik desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Jajuli, 2015).

Kecamatan Suralaga merupakan wilayah dengan potensi sumber daya yang melimpah dan populasi penduduk mayoritas beragama Islam. Alloh

¹http://www.djpk.kemenkeu.go.id/rincian_alokasi_dana_desa_provinsi/kabupaten/kota_dalam_apbn_t.a_2015_2018 (Diakses Pada Tanggal 11 februari 2019)

menurunkan agama Islam dengan menjadikan syariat sebagai jalan penghubung antara manusia dengan tuhan, maupun manusia dengan manusia lainnya. Jika ditelaah lebih jauh mengenai kondisi sosial keagamaan, situasi lingkungan dan potensi sumber daya di Suralaga sangat mendukung apabila pemanfaatan Dana Desa diterapkan dengan pendekatan syariat Islam. Dalam ajaran Islam terdapat sebuah konsep syariat dalam menyelesaikan segala urusan yang sifatnya *zohiriyah* maupun *batiniyah* yaitu konsep *maqoshid syari'ah*. Penggunaan konsep tersebut tidak hanya sebatas dalam menyelesaikan suatu perkara ibadah dan syariat saja. Kini sudah banyak para cendekiawan Muslim yang mengembangkan konsep *maqoshid syari'ah* dalam mengatasi perkara muamalah diantaranya politik, ekonomi, dan keuangan. Dalam perkara keuangan misalnya pada anggaran desa pun dapat digunakan konsep *maqoshid syari'ah* sebagai acuan atau prinsip dasar dalam menata pengelolaan Dana Desa.

Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Suralaga sendiri memang belum menggunakan pendekatan *maqoshid syari'ah*. Implementasi anggaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Prioritas Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Akan tetapi, jika dilihat dari pengimplementasian Dana Desa di beberapa desa yang ada di Suralaga sudah mencerminkan penerapan prinsip *maqoshid syari'ah*. Perlu ditekankan bahwa penggunaan prinsip *maqoshid syari'ah ad-dhururiyah* dalam mengelola Dana

Desa, dimaksudkan sebagai acuan / prinsip alternatif baru, selain kedua peraturan menteri diatas.

Konsep *maqoshid syari'ah* bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan (kemaslahatan) ummat umumnya. Menurut Syathibi dalam kitabnya yang berjudul "*al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*" disebutkan bahwa syari'at diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, baik itu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Alloh SWT dalam al-Qur'an Surat *an-Nisa* ' Ayat 135:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan (kemaslahatan) ummat menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemerintah sebagai *amirul mukminin*. Dalam hal ini adalah pemerintah desa yang dipilih dan diangkat atas amanat rakyat desa, agar melaksanakan tanggung jawabnya memberikan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat menjabat sebagai *amirul muminin* seperti yang diungkapkan oleh Jajuli (2015), beliau mendistribusikan anggaran belanja negara dengan menjangkau kelima aspek kebutuhan dasar manusia (*ad-dhururiyatul al-khams*), hal ini dilakukan dengan tujuan membangun kesejahteraan agama, sosial, budaya,

² Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (An-Nisa' 135)

dan ekonomi masyarakat saat itu. Kunci keberhasilan Khalifah Umar didapat melalui tiga cara, yakni: Pertama, harta diambil dengan cara yang benar/hak. Kedua, mendistribusikan harta tersebut kemasyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at. Ketiga, kemudian harta itu diawasi untuk mencegah dari kebatilan.

Khalifah Umar bin Khattab dimasa pemerintahannya telah mencontohkan bagaimana penerapan *maqoshid syari'ah* dalam membangun suatu negara. Belajar dari apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar, sangatlah tepat jika pemanfaatan Dana Desa menggunakan perspektif *maqoshid syari'ah*, karena di dalam konsep pembangunan dengan prinsip *maqoshid syari'ah* sudah mencakup kelima aspek kebutuhan dasar manusia. Menurut Jajuli (2015) kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kelima aspek pokok dalam teori *maqoshid syari'ah* atau yang biasa disebut *ad-dhururiyatul al-khams* yaitu: pembangunan agama (*hifzul din*), pembangunan jiwa (*hifzun nafs*), pembangunan ilmu pengetahuan (*hifzul aql*), pembangunan generasi (*hifzun nasl*) dan pembangunan ekonomi (*hifzul maal*). Kelima konsep *maqoshid syari'ah* diatas menjangkau seluruh aspek pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik.

Pemanfaatan Dana Desa di Suralaga masih belum seimbang antara pembangunan fisik dengan pembangunan non-fisik dan masih jauh dari tuntunan syari'at, sebagaimana yang telah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Pemanfaatan Dana Desa di Suralaga masih memprioritaskan pada pembangunan fisik semata, hanya sebagian kecil dari anggaran maupun kegiatan desa yang menyentuh ranah non-fisik. Ini terlihat dari banyak infrastruktur jalan baru yang dibangun, namun pembangunan sumber daya manusianya sangat jauh terbelakang

dibandingkan dengan desa maju lainnya. Dalam pembangunan wilayah tidak bisa dipisahkan antara pembangunan fisik dan non-fisik, sebab prinsipnya pembangunan non-fisik merupakan dasar untuk melakukan pembangunan fisik (Efendi, 2002).

Seirama dengan yang diungkapkan oleh Novia (2015) bahwa pemanfaatan Dana Desa yang baik dapat dilihat dari pembangunan fisik dan non-fisiknya. Pemanfaatan Dana Desa tidak hanya bertumpuk pada pembangunan fisik semata, akan tetapi pembangunan non-fisik juga harus dibangun beriringan dengan pembangunan fisik (Rangga, 2011). Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat material seperti rumah ibadah, perumahan, jalan, puskesmas, poskamling, dan fasilitas lainnya. Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang sifatnya immaterial (spiritual, moral dan intelektual) seperti kegiatan pengajian (ceramah), sosialisasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan sumber daya manusia. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memperhatikan pembangunan non-fisik, supaya tercipta kehidupan masyarakat yang religius, berdikari, bermartabat, berkesinambungan dan berdaya saing.

Berangkat dari uraian literasi di atas, peneliti tertarik untuk menggali informasi dan melakukan kajian mengenai implementasi Dana Desa yang terjadi di desa-desa yang ada di Suralaga, sehingga ditarik tema penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Perspektif *Maqoshid Syari’ah* (Studi Dokumentasi Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)” dengan tujuan untuk mengukur pemanfaatan Dana Desa dalam membangun

fasilitas, spiritualitas, moralitas dan intelektualitas masyarakat Suralaga dikaji dengan perspektif *maqoshid syari'ah*.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menghadirkan prinsip / acuan dalam pemanfaatan Dana Desa sebagai tambahan alternatif baru, selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yaitu dengan prinsip *maqoshid syari'ah ad-dhururiyah* meliputi pembangunan agama (*hifdzud din*), pembangunan jiwa (*hifdzun nafs*), pembangunan ilmu pengetahuan (*hifdzul aql*), pembangunan generasi (*hifdzun nasl*), pembangunan ekonomi (*hifdzul maal*). Dari rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Suralaga dari tahun 2016-2018?
2. Apa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dikaji dari perspektif *maqoshid syari'ah*?
3. Apakah pemanfaatan Dana Desa di Suralaga sudah sesuai dengan *maqoshid syari'ah*?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Suralaga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu: bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang penyeleenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Menganalisis prioritas penggunaan Dana Desa, baik dalam pembangunan sifatnya fisik maupun non-fisik, dikaji dengan perspektif *maqoshid syari'ah*

ad-dhururiyah yakni: membangun agama (*hifzud din*), membangun jiwa (*hifzun nafs*), membangun pendidikan (*hifzul aql*), membangun generasi (*hifzul nasl*), dan membangun ekonomi (*hifzul maal*).

- 3) Mengkaji sejauh mana pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Suralaga diukur dari sudut pandang *maqoshid syari'ah*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki dua kegunaan diantaranya: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan bagi seluruh elemen masyarakat dan menambahkan pengetahuan atau wawasan mengenai Dana Desa dan teori-teori pembangunan desa dengan perspektif *maqoshid syari'ah* seperti yang telah dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya.

1.4.2. Kegunaan secara praktis

- a) Bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa sebagai praktisi. Semoga penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam mengatur skala prioritas penggunaan Dana Desa dengan prinsip alternatif yakni dengan *maqoshid syari'ah ad-dharuriyah*.

- b) Bagi akademik, khususnya mahasiswa dan dosen sebagai akademisi.

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi ilmiah dan pengetahuan

tambahan bagi civitas akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai media bacaan di perpustakaan, maupun di situs internet resmi milik perpustakaan.

- c) Bagi peneliti selanjutnya yang sejenis. Semoga penelitian ini menjadi rujukan dan referensi tambahan dalam penelitian tentang pengelolaan Dana Desa dalam pandangan Islam atau paradigma pembangunan wilayah dengan prinsip *maqoshid syari'ah*.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan atau pemanfaatan Dana Desa yang diperuntukkan dalam membangun desa baik pembangunan fisik, maupun non-fisik diukur dengan konsep *maqoshid syari'ah ad-dhururiyah*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jajuli (2015) bahwa konsep *maqoshid syari'ah ad-dhururiyah* terdiri dari lima aspek dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan yakni 1) pembangunan agama (*hifdzud din*), 2) pembangunan jiwa (*hifdzun nafs*), 3) pembangunan ilmu pengetahuan (*hifdzul aql*), 4) pembangunan generasi (*hifdzun nasl*) dan 5) pembangunan harta atau ekonomi (*hifzul maal*).

Konsep *maqoshid syari'ah ad-dhururiyah* menjadi prinsip alternatif baru dalam mengelola anggaran desa, seandainya tidak diberlakukan lagi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Prioritas Pembangunan Desa. Diharapkan dengan konsep *maqoshid syari'ah* ini bisa

menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan Dana Desa dengan lebih efektif dan efisien.

1.6. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dirancang peneliti sebagai acuan dan gambaran selama berlangsungnya proses penulisan penelitian ini, sebagai berikut: **Bab 1 Pendahuluan**, menjabarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika pembahasan. **Bab 2 Kajian Pustaka**, memuat tentang diskripsi desa, Dana Desa, pemanfaatan Dana Desa, teori *maqoshid syari'ah*, paradigma penelitian dan penelitian terdahulu. **Bab 3 Metode Penelitian**, berisi penjelasan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahapan penelitian. **Bab 4 Pembahasan dan Hasil**, yakni menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan selama proses penelitian dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa Perspektif *Maqoshid Syari'ah* (Studi Lapangan Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. **Bab 5 Penutup**, berisi pemaparan mengenai kesimpulan yang berisi pernyataan singkat dari hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut, kemudian implikasi atau dampak penelitian ini secara teoritis dan praktis, dan saran yang berisi tentang masukan-masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan program-program desa masih banyak yang harus diperbaiki. Peneliti melihat di Kecamatan Suralaga implementasi program desa dan aplikasi Dana Desa dari tahun 2016 samapai 2017, hanya memprioritaskan pada pembangunan yang sifatnya fisik (matril) sedikit sekali menyentuh pembangunan non-fisik (immateril) masyarakat, sebut saja pada kegiatan-kegiatan seperti pengajian, pelatihan dan juga pendidikan sedikit sekali mendapatkan porsi program, maupun porsi anggaran.

Setelah dilakukan serangkaian penelitian dengan pengukuran *maqoshid syari'ah*, ditemukan bahwa di Desa Paok Lombok masih belum sesuai dengan prinsip *maqoshid syari'ah*, karena dalam distribusi anggaran untuk pengembangan agama (hifzud din) belum ada anggaran bahkan programnya pun tidak ada. Namun implementasi anggaran dan distribusi programnya mulai merata ke dalam *ad-dhururiyatul al-khams* ditahun 2018. Sedangkan Di Desa Tumbuh Mulia dan Bintang Rinjani mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pemanfaatan Dana Desanya sudah merata ke dalam lima indikator *maqoshid syari'ah*.

Distribusi program desa dan implementasi anggarannya masih memprioritaskan pembangunan fisik atau pembangunan ekonomi (*hifzul maal*). Sedikit sekali program-program desa yang menyentuh kehidupan beragama

(*hifzud din*), penyelenggaraan pelatihan (*hifzul aql*), maupun pemberdayaan keturunan (*hifzul nasl*), sebut saja pada pembangunan agama proqramnya hanya pembangunan dan renovasi rumah ibadah (masjid), itupun bagian terkecil bila dibandingkan dengan anggaran program pembangunan infrastruktur misalnya.

5.2. Implikasi

Meskipun anggaran Dana Desa ditiga desa yang diobservasi lebih mengutamakan dalam hal pembangunan sarana dan prasana, namun distribusi dana dan tujuan implementasi program-programnya sudah termasuk dalam syarat-syarat *maqoshid syari'ah*, seperti pendapat Wahbah al-Zuhaily bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqoshid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat.

Dari keempat syarat-syarat yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa pembangunan, sarana dan prasarana desa itu memiliki sifat yang tetap, jelas keberadaannya, terukur dalam bentuk batasan-batasan dalam pembangunannya, dan terakhir berlaku umum yang berarti bisa dimanfaatkan oleh seluruh

masyarakat desa khususnya desa-desa yang ada Di Kec.Suralaga, Kab.Lombok Timur. Meskipun implemetasi Dana Desa Paok Lombok, Desa Tumbuh Mulia, dan Desa Bintang Rinjani tidak menerapkan menganut prinsip-prinsip *maqoshid syari'ah*, namun sejak tahun 2018 diketiga desa tersebut sudah menganggarkan anggaran dana, maupun implementasi programnya sudah sedikit menyentuh kelima indikator *maqoshid syari'ah* yang disebut *ad-dhururiyatul al-khams*, walaupun masih belum memadai.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: seluruh masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat mengetahui:

- a. Diharapkan Dana Desa dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup, dan juga mendatangkan kesejahteraan masyarakat Desa Paok Lombok, Tumbuh Mulia, dan Bintang Rinjani, Kec.Suralaga, Kab.Lotim, melalui tatakelola yang baik dan pemanfaatan yang tepat guna sesuai kondisi desa.
- b. Diharapkan implementasi anggaran desa dan distribusi programnya di antaranya yang akan datang diterapkan kebijakannya berdasarkan indikator *ad-dharuriyah al-khams* dengan lebih merata, agar pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik saja, tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap pembangunan non-fisik, baik pembangunan spiritual, maupun pembangunan moral.

- c. Diharapkan masyarakat Desa Paok Lombok, Tumbuh Mulia, dan Bintang Rinjani, berpartisipasi langsung, dan memberi masukan yang positif terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desanya, sehingga prioritas pembangunan desa dapat bertujuan untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar sesuai prinsip *maqoshid syari'ah*, agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih berdaulat, mandiri, maju serta demokratis.
- d. Diharapkan kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan lembaga pengawas lainnya, supaya lebih intens dalam mengawasi implementasi dan desa, agar penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa tidak terjadi lagi.
- e. Diharapkan peranan aktif dari lembaga-lembaga desa seperti BPD, LKMD dan LPM sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, sehingga pembangunan desa tidak hanya dipikul oleh pemerintah desa saja. Membangun sebuah desa sangatlah tidak mudah, mengingat permasalahannya yang begitu kompleks. Untuk itu, harus ada koneksitas antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa, agar percepatan pembangunan desa diberbagai aspek cepat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al-Badawiy, Yusuf Muhammad, T.Th., *Maqoshid Al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyah*. Yordania: Dar Al-Nafais.
- Al-Būṭi, Muhammad Sa'id Ramaḍan. 2001. *Ḍawabiṭ Al Maṣlaḥah Fī Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, Cet 6,
- Al-Yasa, Abubakar. 2016. *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana,
- Al-Zuhaily, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar Al-Fikr.
- As-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Gharnati. *Al-Muwafaqat Fi Ushaul Al-Ahkam*. 11 TTP: Dar Al-Fikr, T.T.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp): Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Pt. Gunung Agung
- Burhan, Bungin, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Danial dan Wasriah (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*
- Departemen Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 2017. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Jakarta.
- Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Direktorat Jenderal. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa)*. Jakarta.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Pt. Uhindo Dan Offset

- Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara,
- Jajuli, Sulaeman. 2015. *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Jauhar, Husen, & Ahmad Al-Mursi. 2009. *Maqoshid Al-Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Koentjaraningrat. 2001. *Masyarakat Desa Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Lexy J. Moleong: *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muljana B.S. 2001. *Teori Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN
- Nurcholis, Hanif: 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga,
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 111*. Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Prima Yasa
- Raisuni, Ahmad. 1995. *Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Asy-Syaṭibi*. Cet. 4. Riyadh: Ad-Dar Al-'Alamiyyah Li Al-Kuttab Al-Islamiyyah.
- Sudjono, Anas. 2002. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta
- Suhartono. 2001. *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi 12*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya. Haw, 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa (Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat)*. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo
- Yusanto, M. Ismail dan Yunus, M.Arif. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa, Pemerintah Mengalokasikan Dana Desa, Melalui Mekanisme Transfer Kepada Kabupaten/Kota.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang pemerintahan daerah.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Negara Di mana Dana Desa Yang Berasal Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Termasuk Ke dalam Kategori Dana Negara Karena Sumbernya APBN Dan APBD*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/Pmk.07/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.07/2015. *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa.*

Penelitian Terkait

- Antonius, Galih Prasetyo & Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi*. Jurnal Desentralisasi Vol. 13 No.1
- Chasanah Khuswatun, Slamet Rosyadi, & Denok Kurniasih. 2017. *Implementasi Kebijakan Dana Desa*. Ijpa-The Indonesian Journal Of Public Administration. Universitas Jenderal Soedirman. Vol 3. No 2. E-Issn: 2460-0369.
- Darmiasih, Ni Kadek, *Et Al*. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sideman, Kab. Karangasem)*. E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 1 No 3.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno Dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Fakhrunnisa Adinda, 2017, Analisis Perbandingan Kinerja Pt. Bprs Puduarta Insani Dan Pt. Bprs Amanah Insan Cita Ditinjau Dari *Maqoshid Sharia Index*, Tesis, UIN Sumatera Utara
- Finarti, Aan Dan Purnama Putra. 2015. *Implementasi Maqoshid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syari'ah*. Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45". Vol. 4 No 1.

- Ghulam, Zainil. 2016. *Implementasi Maqoshid syari'ah Dalam Koperasi Syari'ah*. Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 Hal 24-32
- Hidayat Syarif. 2008. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*. Jurnal Politik. Vol 1, No 1
- Khoiriah Siti, Utia Meylina. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Jilid 46 No1.P-Issn: 2086-2695, E-Issn: 2527-4716. Hal 20-29
- Lipi, 2016, *Otonomi Daerah Dan Pembangunan Perdesaan*, Jurnal Politik, Vol.13, No.2, Desember 2016,
- Maftukhatusolikah, 2013. *Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap Apbn 2008-2013)*, Intizar, Vol 21 (1) Hal 23—37
- Meutia, Inten Liliana, 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Universitas Sriwijaya, Palembang, Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Jamal. Vol 8. No 2. Hal 227-429
- Nurliana. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Ejournal Administrasi Publik. Volume 1 (Nomor 3, 2013), 1059-1070.
- Novia. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Add Studi Di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*. Ejournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 Issn 2337-7542, Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id.
- Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (1) Hal. 83-90
- Permadi, Danang. 2017. *Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Pp No. 60 Tahun 2014 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Malasan Dan Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Trenggalek)*. Tesis. Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung.
- Rangga, Bhian J.R. 2011. *Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non-fisik. Surakarta: Makalah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret*. Hal. 3-7
- Riyanto Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan*

Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Ejournal Administrasi Negara, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542, Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id.

Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.

Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. E-Journal Katalogis, Vol 3 Nor 2.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung*. Jurnal Pemerintahan Integratif, 1, Hal 51–64.

Wahib, Muhammad Abdi & Hendri Cahyono. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya Vol. 3 No. 3

Wida, 2016 *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Wisakti, Daru. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Dipongoro. Semarang.

Wiradarma Made S, Dkk. 2017. *Akuntansi, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa*, E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program, Vol 7. No 1 Hal 9-15

Website

Bps Lotim. 2015. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. lomboktimurkab.bps.go.id (diakses tanggal 25 juli 2019)

Bps Lotim. 2016. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. lomboktimurkab.bps.go.id (diakses tanggal 28 agustus 2019)

Bps Lotim. 2017. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. lomboktimurkab.bps.go.id (diakses tanggal 2 agustus 2019)

- Bps Lotim. 2018. *Kecamatan Suralaga District In Figures 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. lomboktimurkab.bps.go.id (diakses tanggal 5 agustus 2019)
- Blogspot. [Http://desatumbuhmulia.blogspot.com_desa_tumbuh_mulia](http://desatumbuhmulia.blogspot.com_desa_tumbuh_mulia). (Diakses 21 juni 2019).
- Blogspot. [Http://desabintangrinjani.blogspot.com_desa_bintang_rinjani](http://desabintangrinjani.blogspot.com_desa_bintang_rinjani). (Diakses 25 juni 2019).
- Facebook. [Http://desapaoklombok.facebook.com](http://desapaoklombok.facebook.com) (Diakses 20 juni 2019).
- Fuji. 2015. *Pengertian Pembangunan Fisik* http://www.trigonalmedia.com/2015/07/pengertian_pembangunan_fisik.html (Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2019).
- Kemenkeu. http://www.djpk.kemenkeu.go.id_rincian_alokasi_dana_desa_provinsi/kabupaten/kota_dalam_apbn_t.a_2015_2018 (Diakses Pada Tanggal 11 februari 2019)
- Miles Dan Huberman: *Analisis Data Kualitatif*. [Http://www.Bkpemula.Wordpress.Com](http://www.Bkpemula.Wordpress.Com) (Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2019)
- Wikipedia. [Http://wikipedia.Org/wiki/kecamatan_suralaga_lombok_timur](http://wikipedia.Org/wiki/kecamatan_suralaga_lombok_timur). (Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2019)

Dokumen Lainnya

- Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paok Lombok. Tahun 2016 – 2018.
- Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tumbuh Mulia. Tahun 2016 – 2018.
- Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bintang Rinjani. Tahun 2016 – 2018.
- Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Paok Lombok. Tahun 2018
- Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tumbuh Mulia. Tahun 2018
- Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Bintang Rinjani. Tahun 2018
- Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Paok Lombok 2018
- Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tumbuh Mulia 2018
- Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Bintang Rinjani 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA